

HUBUNGAN PEMERINTAH DESA DENGAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 2010-2011

(Study Desa Mekar jaya Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan)

Oleh :

EKA HADINUR S

Dosen Pembimbing : Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si

Email : Radytmontez@ymail.com

Abstract

The research looked at the Government Relations Institute of Rural Community Empowerment in Rural Development in implementing Mekar jaya, The main problem in this research is How Government Relations village with Community Empowerment Institute (LPM) in the implementation of Rural Development 2010-2011, and the factors that cause not synergy relationship with the village government Institute for Community Empowerment (LPM) in the implementation of Rural Development 2010-2011, The theory used is the institutional theory, theory of coordination and supervision

This study uses *rengulasi* that combines quantitative methods with qualitative methods, This study used questionnaires and interviews with key informants as the object of information that aims to achieve the goal, The types of data used in this study is primary data and secondary data obtained through observation, questionnaires and interviews with key informants study.

Based on the analysis conducted on the study data in order to uncover and answer research questions related to the government's relationship with the village Institute for Community Empowerment (LPM) in the implementation of rural development in Mekar jaya Village, can be concluded that the relationship between the two institutions is not good, it can be proved to not work well all the work programs and the Village Government buildings completed physical

Key word : Relations, implementation, Development

Pendahuluan

Kelahiran undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian diganti dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 sangat erat kaitannya dengan perubahan kebijakan desentralisasi di Indonesia, undang-undang ini membawa pergeseran paradigma terhadap penyelenggaraan pemerintahan mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintahan desa. Melalui undang-undang no 32 tahun 2004 masyarakat desa diharapkan lebih otonom dan demokratis.

Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang menjadi mitra pemerintahan desa itu sendiri salah satunya adalah LKMD namun lembaga ini beganti nama sesuai yang diamanatkan dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Lembaga ini dibentuk masyarakat dan untuk masyarakat yang unsur-unsur nya terdiri

dari para pemuka masyarakat di desa yang bersangkutan, sedangkan pengaturan dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintahan desa.

Pemerintahan Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional. Karena perannya yang besar, maka perlu adanya Peraturan-peraturan atau Undang-Undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintahan desa, Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang menjadi mitra pemerintahan desa itu sendiri salah satunya adalah LKMD namun lembaga ini berganti nama sesuai yang diamanatkan dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Lembaga ini dibentuk masyarakat dan untuk masyarakat yang unsur-unsurnya terdiri dari para pemuka masyarakat di desa yang bersangkutan, sedangkan pengaturan dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintahan desa.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah desa untuk mengelola, merencanakan dan melaksanakan pembangunan dengan menggali swadaya gotong royong masyarakat desa. Pembangunan desa merupakan upaya pembangunan yang dilaksanakan di desa dengan ciri utama adanya partisipasi aktif masyarakat dan kegiatannya meliputi seluruh aspek kehidupan baik fisik material maupun mental spiritual. Kebijakan-kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat akan sangat tergantung kepada siapa yang menentukannya, bagaimana proses penentuannya, siapa yang dapat mempengaruhinya, serta bagaimana diimplementasikannya agar masyarakat dapat membangun ruang untuk dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan desa sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal.

Penelitian ini menitikberatkan pada pembangunan desa berswadaya, bisa dilihat dari hubungan pemerintah desa dengan LPM. Adapun tugas dan Fungsi LPM itu sendiri adalah sebagai berikut :

Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat :

1. Menyusun rencana pembangunan yang berpartisipasi
2. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat
3. Melaksanakan pengendalian pembangunan

LPM sebagai mitra kerja Pemerintahan, berfungsi:

1. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat desa /kelurahan
2. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan
3. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan
4. Menggali serta memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat untuk pembangunan
5. sebagai media komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah dan antara masyarakat itu sendiri
6. Memberdayakan dan menggerakkan potensi pemuda dalam pembangunan

7. Mendorong mendirikan dan memberdayakan peran wanita dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga
8. Membangun kerjasama antar lembaga yang ada di masyarakat dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan taraf hidup

Adapun bentuk hubungan antara pemerintah desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat menurut Himawan Pembudi (2003:94) adalah:

1. Hubungan pertanggung jawaban, dimana LPM memberikan pertanggung jawaban atas kerja-kerja yang dilakukan
2. Hubungan konsultasi dan kerjasama, dimana pemerintah desa bisa melakukan konsultasi dan kerja sama dengan LPM
3. Hubungan kerja, dalam hal ini membuat perencanaan pembangunan desa secara partisipatif
4. Hubungan Koordinasi dimana kedua lembaga saling koordinasi untuk mendapat hasil yang diinginkan dalam hal ini penyusunan rencana pembangunan desa.

Sedangkan hubungan antara pemerintah desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah:

1. Hubungan kontrol, Lembaga pemberdayaan masyarakat melakukan kontrol atas kerja pemerintah desa
2. Hubungan kerja sama, dalam hal ini Lembaga Pemberdayaan Masyarakat menyampaikan usulan-usulan atau ide-ide yang merupakan rumusan dari berbagai aspirasi masyarakat dan selanjutnya di teruskan rencana pembangunan dan pelaksanaan pembangunan.

Dilihat dari tugas dan fungsi dan bentuk hubungan antara kedua lembaga diatas, maka seharusnya terjadi sinergisitas yang baik antara pemerintah desa dengan LPM supaya tercapai apa yang dicita-citakan dalam pemerintahan desa.

Tapi di desa Mekar Jaya Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan terlihat belum terjalannya kerjasama yang baik antara pemerintah desa dengan LPM dalam pembangunan desa, ini dapat terlihat dari: kurangnya kesadaran atau kemauan dari aparat pemerintah desa dan LPM dalam upaya kerjasama yang ideal, pemerintah desa dan LPM masih mementingkan kepentingan masing-masing sehingga tidak mengetahui hak dan kewajiban masing-masing.

Pemerintah desa dan LPM tentu saja sebagai mitra kerja yang seharusnya hal-hal seperti diatas tidak terjadi, tidak berlebihan juga jika masyarakat menaruh harapan besar untuk pembangunan desa yang lebih baik kepada kedua lembaga ini dengan tidak mengecilkan lembaga lain di pemerintahan desa.

Setelah dua tahun terbentuk, peranan LPM di desa Mekar Jaya dalam menjalankan tugas dan fungsinya masih terbilang minim, hal ini tentu saja tidak sesuai dengan tujuan berdirinya LPM itu sendiri, yakni mengembangkan segala potensi masyarakat yang ada ke arah pembangunan desa partisipatif, selain itu LPM sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat diharapkan mampu membawa perubahan bagi desanya dengan cara menjalankan serta melaksanakan fungsi yang diembannya secara maksimal.

Berkaitan dengan hubungan antara pemerintah desa dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di desa Mekar Jaya. Gejala yang tampak pada penelitian ini adalah:

Pertama, dalam hubungan kerja sama, kurangnya kesadaran atau kemauan dari aparat pemerintah desa dan LPM dalam upaya kerjasama yang ideal, pemerintah desa dan LPM masih mementingkan kepentingan masing-masing sehingga tidak mengetahui hak dan

kewajiban masing-masing. Sehingga rencana pembangunan desa yang telah di sepakati ada yang telah berjalan dengan baik dan ada yang belum terselaikan dengan baik.

Bangunan-bangunan fisik yang belum terselaikan yaitu :

1. Pembangunan jalan
2. Pembnagunan SD (sekolah dasar)
3. Pembangunan madarasah

Yang telah berjalan dengan baik dan tetap berjalan yaitu :

1. Pembangunan infrastruktur kantor desa
2. Swadaya gotong royong

Kedua, dalam hubungan pengawasan, tidak berjalannya pengawasan terhadap pemerintah desa dan sebaliknya.

Dari paparan fenomena yang terjadi, ini menyebabkan ada dampak negatif yang terjadi, salah satunya tidak berjalan dengan baiknya apa yang menjadi tugas pokok dari kedua lembaga ini dalam pelaksanaan pembangunan desa, dan menjadi rendahnya tingkat partisipatif masyarakat,

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memakai metode triangulasi yang berupa gabungan metode kualitatif dan metode kuantitatif, dimana peneliti mengumpulkan data dan mengelompokkan sesuai dengan jenis data kemudian data di olah selanjutnya.

Hasil Pembahasan

Di dalam bab ini penulis akan menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dari informan, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kaur Pembangunan, Kepala Dusun, RT, RW dan Tokoh Masyarakat.

Wawancara dilakukan sesuai dengan jumlah sampel yang menjadi informan dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan telah dapat dikumpulkan sejumlah data yang diperlukan, meliputi data tentang identitas responden, analisa relasi Kepala Desa dengan masyarakat terhadap partisipasi masyarakat, serta faktor-faktor penyebab keberhasilan kepala desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Dalam pelaksanaan penelitian tentang hubungan pemerintah desa dengan LPM, peneliti menganalisa permasalahan yang ada yakni,

Secara umum, Kepala Desa di Desa Mekar Jaya Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan tidak memiliki partisipasi yang tinggi dalam pembangunan desanya. lain pula halnya dengan LPM yang sangat antusias untuk selalu berpartisipasi dalam hal pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari dua faktor yang mempengaruhi terhadap berhasil atau gagal nya partisipasi pemerintah desa dan LPM dalam pelaksanaan pembangunan, yakni:

1. Analisa hubungan pemerintah desa dengan LPM

- a. Hasil keterlibatan masyarakat itu sendiri, masyarakat tidak akan berpartisipasi dengan antusias yang tinggi dalam kegiatan perencanaan jika mereka merasa bahwa

partisipasi mereka dalam perencanaan tersebut tidak mempunyai pengaruh pada rencana akhir.

- b. Masyarakat merasa enggan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan yang tidak menarik minat mereka atau yang tidak mempunyai pengaruh langsung yang dapat mereka rasakan.

Sedangkan berdasarkan data yang didapatkan dilapangan, bahwa terdapat beberapa bangunan fisik hasil MusRenbang yang belum terselesaikan pelaksanaannya adalah :

1. Pembangunan jalan desa
2. Pembangunan Sekolah Dasar (SD)
3. Pembangunan Madrasah.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa partisipasi pemerintah desa dalam melakukan pembangunan Desa Mekar Jaya sudah tergolong baik. Namun demikian, banyak bangunan yang tidak terselesaikan dengan baik. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yang akan sangat mempengaruhi tidak berjalannya program yang sudah di tetapkan oleh pemerintah desa

1.1. Kerja sama Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa

Perencanaan pembangunan bertujuan memberikan gambaran pembangunan yang akan dilalui. Dengan kata lain suatu perencanaan pembangunan merupakan strategi yang hendaknya memperhatikan aspek politik-sosial-ekonomi, termasuk seberapa besar peranan pemerintah.

Namun dalam prosesnya penyusunan rencana pembangunan desa di Desa Mekar Jaya terdapat beberapa kendala yaitu:

1. Dalam hal kehadiran mengikuti rapat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dikatakan sangat minim, dari 10 agenda rapat desa, LPM hanya mengahadiri nya sebanyak 3kali dan hanya diwakili oleh anggotanya.
2. minimnya bantuan LPM kepada Pemerintah Desa dalam penyusunan rencana Pembangunan Desa seperti minimnya ide-ide untuk pembangunan desa, banyak ide-ide dalam rapat munculnya dari Pemerintah Desa sendiri.

Ada beberapa Pembangunan-pembangunan Fisik yang telah di sepakati dalam MusRenBang .Untuk melihat tanggapan responden mengenai pelaksanaan pembangunan di Desa Mekar Jaya, dapat di lihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 3.5 Tanggapan Responden Mengenai Pembangunan di Desa Mekar Jaya

No	Indikator	Kategori Tanggapan			Jumlah
		SB	B	TB	
1	Pembangunan jalan desa	0 (0,00%)	9 (36,0%)	16 (64,0%)	25 (100%)
2	Pembangunan Sekolah Dasar (SD)	3 (12,0%)	8 (32,0%)	14 (56,0%)	25 (100%)
3	Pembangunan Madrasah	0 (0,00%)	12 (48,0%)	13 (52,0%)	25 (100%)

4	Gotong Royong	2 (8,0%)	5 (20,0%)	18 (72,0%)	25 (100%)
Jumlah					100
Rata-rata					25
Persentase					100 %

Sumber : Data Olahan 2012

Berdasarkan tabel di atas, dapat jelaskan bahwa kondisi pembangunan jalan di desa Mekar Jaya diketahui bahwa sebanyak 9 orang atau sebesar 36,0 % responden menyatakan Baik, dan sebanyak 16 orang atau sebesar 64,0 % responden menyatakan Tidak Baik. Kemudian mengenai pembangunan Sekolah Dasar (SD) diketahui bahwa sebanyak 3 orang atau sebesar 12,0 % responden menyatakan Sangat Baik, selanjutnya sebanyak 8 orang atau sebesar 32,0 % responden menyatakan Baik dan sebanyak 14 orang atau sebesar 56,0 % responden menyatakan tidak baik.

Kemudian mengenai pembangunan Madrasah diketahui bahwa sebanyak 12 orang atau sebesar 48,0 % responden menyatakan Baik dan sebanyak 13 orang atau sebesar 52,0 % responden menyatakan Tidak Baik. Selanjutnya mengenai kegiatan gotong royong diketahui bahwa sebanyak 2 orang atau sebesar 8,0 % responden menyatakan Baik, selanjutnya sebanyak 5 orang atau sebesar 20,0 % responden menyatakan Tidak Baik.

1.2. Pengawasan program kerja

Menurut Sondang Siagian (2002 : 169) pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya dan pengawasan secara filosofi, dapat dikatakan adalah mutlak perlu karena manusia bersifat salah, paling sedikit khilaf.

Agar proses pengawasan dapat berjalan dengan efektif, maka ada 5 tahap proses pengawasan yang harus dijalankan, yaitu:

1. Penetapan standart
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan
4. Perbandingan pelaksanaan dengan standart dan analisa penyimpangan
5. Pengambilan tindakan koreksi

Untuk melihat tanggapan responden tentang pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6

Jawaban Responden Tentang Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Mekar Jaya

No	Indikator	Kategori Tanggapan			Jumlah
		SB	B	TB	
1	Bagaimana Penerapan standart pembangunan desa	6 (24,0%)	2 (8,0%)	17 (68,0%)	25 (100%)
2	Bagimana Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan pembangunan desa	0 (0,00%)	11 (44,0%)	14 (56,0%)	25 (100%)
3	Bagimana teknik pengukuran pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan	3 (12,0%)	10 (40,0%)	12 (48,0%)	25 (100%)
4	Perbandingan pelaksanaan dengan standart dan analisa penyimpangan	0 (0,00%)	9 (36,0%)	16 (64,0%)	25 (100%)
5	Pengambilan tindakan koreksi yang dilakukan	5 (20,0%)	7 (28,0%)	13 (52,0%)	25 (100%)
Jumlah					125
Rata-rata					25
Persentase					100 %

Sumber: Data Olahan 2012

Berdasarkan tabel III.5 di atas mengenai tanggapan responden tentang penerapan standart pembangunan desa yang dilakukan Kepala Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Mekar Jaya, diketahui bahwa sebanyak 6 atau sebesar 24,0 % responden menyatakan Sangat Baik, kemudian sebanyak 2 orang atau sebesar 8,0 % responden menyatakan baik dan sebanyak 17 orang atau sebesar 68,0 % menyatakan tidak baik.

Kemudian tanggapan responden tentang Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang dilakukan Kepala Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Mekar Jaya, diketahui bahwa sebanyak 11 orang atau sebesar 44,0 % responden menyatakan baik dan sebanyak 14 orang atau sebesar 56,0 % menyatakan tidak baik.

Selanjutnya tanggapan responden tentang teknik pengukuran pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan yang dilakukan Kepala Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Mekar Jaya, diketahui bahwa sebanyak 3 orang atau sebesar 12,0 % responden menyatakan sangat baik, kemudian sebanyak 10 orang atau sebesar 40,0 % responden menyatakan baik dan sebanyak 12 orang atau sebesar 48,0 % menyatakan tidak baik.

Kemudian tanggapan responden tentang Perbandingan pelaksanaan dengan standart dan analisa penyimpangan yang dilakukan Kepala Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Mekar Jaya, diketahui bahwa sebanyak 9 orang atau sebesar 36,0 % responden menyatakan baik dan sebanyak 16 orang atau sebesar 64,0 % menyatakan tidak baik.

2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tidak Sinergisnya Hubungan Pemerintah Desa Dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa 2010-2011

2.1.Faktor Komunikasi

Menjadi seorang pemimpin bukanlah hal mudah, karena selain di butuhkan dukungan dari kalangan masyarakat, seorang pemimpin juga dituntut untuk dapat berkomunikasi dengan baik, dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang Kepala Desa. Jika tidak memiliki komunikasi yang baik, baik itu dengan warga maupun dengan perangkat desa lainnya, maka sudah dapat dipastikan bahwa tidak akan terwujud hubungan yang baik dan harmonis di lingkungan Desa tersebut.

Untuk melihat tanggapan para perangkat Desa mengenai hubungan komunikasi Kepala Desa Mekar Jaya Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dengan LPM, dapat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.7

Jawaban Responden Tentang Komunikasi Kepala Desa kepada LPM

No	Indikator	Alternatif Jawaban			Jumlah (%)
		SB	B	TB	
1	Kelancaran Penyampaian Informasi Kepala Desa kepada LPM	1 (4,0%)	6 (24,0%)	18 (72,0%)	25 (100%)
2	Kejelasan informasi dari Pemerintah Desa kepada LPM	3 (12,0%)	9 (36,0%)	13 (52,0%)	25 (100%)
3	Konsistensi Informasi yang diberikan Kepala	6	7	14	25

	Desa kepada LPM	(24,0%)	(28,0%)	(56,0%)	(100%)
Jumlah					75
Rata-rata					25
Persentase					100 %

Sumber: Data Olahan 2012

Berdasarkan tabel III.4 tentang tanggapan responden mengenai hubungan komunikasi Kepala Desa dengan LPM lainnya, diketahui bahwa sebanyak 1 orang atau sebesar 4,0 % responden menyatakan bahwa kelancaran penyampaian informasi Kepala Desa kepada LPM Sangat Baik, kemudian sebanyak 6 orang atau sebesar 24,0 % responden menyatakan bahwa kelancaran penyampaian informasi Kepala Desa kepada LPM Baik dan sebanyak 18 orang atau sebesar 72,0 % responden menyatakan bahwa kelancaran penyampaian informasi Kepala Desa kepada LPM Tidak Baik.

Sedangkan tanggapan responden mengenai kejelasan informasi dari Pemerintah Desa kepada LPM di ketahui bahwa sebanyak 3 orang atau sebesar 12,0 % responden menyatakan sangat baik, kemudian sebanyak 9 orang atau sebesar 36,0 % responden menyatakan baik dan sebanyak 13 orang atau sebesar 52,0 % responden menyatakan tidak baik. Kemudian untuk melihat tanggapan responden mengenai konsistensi informasi yang diberikan Kepala Desa kepada LPM diketahui bahwa sebanyak 6 orang atau sebesar 24,0 % responden menyatakan sangat baik, kemudian sebanyak 7 orang atau sebesar 28,0 % responden menyatakan baik dan sebanyak 12 orang atau sebesar 56,0 % responden menyatakan tidak baik. Dengan demikian dapat diketahui bahwa hubungan komunikasi Kepala Desa dengan LPM tidak baik.

.2.2. Hubungan Kepala Desa Dengan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Setelah pesta demokrasi (pemilihan Kepala Desa) di Desa Mekar Jaya Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada tahun 2010, maka terpilihlah Bapak M. Syawaludin sebagai Kepala Desa Mekar Jaya Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan hingga saat ini. Seluruh masyarakat Desa Mekar Jaya Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan sangat berharap agar Kepala Desa terpilih yang baru, banyak membawa perubahan baik pembangunan, kesejahteraan, pelayanan dan sebagainya.

Namun, berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari warga sekitar, diketahui bahwa Bapak M. Syawaludin dikenal sebagai sosok seorang pemimpin yang kurang dekat dengan warganya. Tidak terkecuali kepada semua warganya yang mayoritas berprofesi sebagai petani

Kesimpulan dan saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang Hubungan Pemerintah Desa dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa 2010-2011 (Study kasus Desa Mekar Jaya Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan), maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Hubungan Pemerintah Desa dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa 2010-2011 kurang baik, ini terlihat dari :

- a. Hubungan kerja sama yang tidak baik dalam Pelaksanaan pembangunan desa
- b. Pengawasan program kerja yang tidak baik
2. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak sinergisnya hubungan Pemerintah Desa dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa 2010-2011 adalah dipengaruhi oleh:
 - a. Komunikasi yang tidak
 - b. Hubungan individu kepala desa dengan ketua LPM yang tidak baik

3. **Saran**

Setelah dilakukan analisis dan kesimpulan pada bagian sebelumnya, maka berikut ini penulis akan memberikan saran yang dimaksudkan untuk memberikan masukan yang lebih baik.

1. Hubungan Pemerintah Desa dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Mekar Jaya Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan harus lebih ditingkatkan lagi, agar Pelaksanaan Pembangunan Desa 2010 – 2011 di Desa Mekar Jaya Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan masyarakat.
2. Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Mekar Jaya Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan untuk mewujudkan pembangunan Desa Mekar Jaya Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan adalah dengan terus menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan semua kalangan, saling mengawasi program pembangunan desa dan meningkatkan hubungan kerja sama dengan semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagong Suyanto & Sutinah, *Metodologi Penelitian Sosial*, Kencana, Jakarta: 2005
- Bulkis, *Manajemen Pembangunan*, (Universitas Hasanudin, Makasar), hal: 9
- Handoko, 1998, *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE.
- Himawan S Pembudi dkk, 2003, *Politik Pemberdayaan jalan mewujudkan Otonomi Desa*, Yogyakarta: Lappera
- Inu Kencana Syafiie, 1999, *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu. 1991. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu, *Metodologi Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Prof. Drs. HAW. Widjaja. 2003. *OTONOMI DESA Merupakan Otonomi yang Asli, bulat dan utuh*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Riyadi, Deddy. 2005. *Perencanaan pembangunan daerah*. Gramedia pustaka utama. Jakarta.
- Sadu, wasistiono, 2000, *Kelembagaan pemerintahan daerah, otonomi daerah dan pemerintah daerah (Undang-undang nomor 32 tahun 2004)*, bahan orientasi tugas dan fungsi DPRD Kota Pekanbaru
- Siagian, Sondang P, 1996, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sukanto, 2002, *Perencanaan Dan Pembangunan Sistem Informasi*, Yogyakarta: Andi Press.
- Sujamto, 2003, *Beberapa Pengertian Dibidang Pengawasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soetrisno, Loekman. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
- Sofyan Safri, 2004, *Sistem Pengawasan Manajemen*, Jakarta: PT. Pusta Quantum.
- Tony, dkk., *Kelembagaan dan Kebijakan Dalam Pengembangan Agroforestri*, (World Forestry Center: 2003).
- Widjaja, 1998. *Administrasi Kepegawaian Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta
- Wiryanto F., *Membangun masyarakat*, (Alumni, Bandung, 1986).
- Wisnu, Hidayat. 2001, *pembangunan partisipatif*. Penerbit YPAPI. Yogyakarta.

Sumber lain :

Tim Redaksi fokusmedia. 2006. Pemerintah Desa dan kelurahan (PPRI No.72 Tahun 2005). Fokusmedia. Bandung.

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa

Winardi, 2003, http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_sosial, diakses tanggal 17 Desember 2011.

http://organisasi.org/pengertian_definisi_dan_arti_organisasi_organisasi_formal_dan_informal_belajar_online_lewat_internet_ilmu_manajemen, diakses tanggal 17 Desember 2011

Skripsi :

Asmida/0310844 Hubungan Badan Perwakilan Desa Dengan Pemerintah Desa DiDesa Kepenuhan Jaya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu 2003-2005